

► KEUANGAN DAERAH

BPK Jateng Selamatkan Uang Negara Rp218,30 Miliar

SEMARANG—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) mengklaim selama 2009-2014 telah menyelamatkan uang negara senilai Rp218,31 miliar.

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Cris Kuntadi, mengatakan uang negara yang diselamatkan ini berasal dari 4.238 temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) senilai Rp850,44 miliar.

"Dari 3.119 temuan LKPD senilai Rp677,28 miliar dan dari temuan 1.119 PDTT senilai Rp173,15 miliar dapat diselamatkan senilai Rp218,31 miliar," katanya dalam *Workshop Dengan Media Massa* dalam rangkaian acara *BPK Awareness* di Kota Semarang, Kamis (9/10).

Cris menyatakan klasifikasi temuan meliputi kerugian negara senilai Rp187,28 miliar, potensi kerugian negara Rp21,05 miliar, dan kekurangan penerimaan Rp173,42 miliar. Selain itu ada ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan senilai Rp468,68 miliar.

"Saat ini yang dalam proses tindak lanjut senilai Rp150,02 miliar, belum ditindaklanjuti senilai Rp13,42 miliar," ungkapnya didampingi Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Jateng, Supriyonohadi.

Terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, Cris

mengungkapkan sebanyak 11 daerah mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Daerah itu masing-masing Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Solo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, Jepara, Boyolali, Banyumas, Purworejo, Kudus, Temanggung. "Sedangkan 25 daerah lainnya mendapatkan penilaian opini wajar dengan pengecualian [WDP]," ucapnya.

Guru SMA

Dia menambahkan tugas BPK Perwakilan Jateng sesuai SK BPK Nomor 3/K/1-XIII.2/7/2014 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Pemprov Jateng, Pemkot/Pemkab, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas. "Serta melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditor Keuangan Negara [AKN]," imbuhnya.

Sementara itu, acara *BPK Awareness* ini mengundang Dinas Pendidikan Jateng dan para guru SMA/SMK mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) se-Jateng.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Nur Hadi Amiyanto, menyambut baik adanya kegiatan dengan BPK karena sesuai dengan visi yang diusung Dinas Pendidikan. "Visi kami adalah pendidikan Jateng yang bermutu, kompetitif, berkarakter, dan berkeadilan," kata dia. *(Insetyonoto)*